

EVALUASI KINERJA KEUANGAN PADA BLUD RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011 – 2015

Rr. Murni Indah Wijayanti

Program Pascasarjana, Universitas Stikubank

e-mail : indah_mw2000@yahoo.com

Gregorius N. Masdjojo

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank

Email : gregymasdjojo@gmail.com

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan tahun 2011 sampai dengan 2015 yang diukur berdasarkan Rasio Keuangan, Rasio Pendapatan PNBPN dan berdasarkan Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang berlokasi di RSUD Bendan Kota Pekalongan. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dengan cara studi dokumenter terhadap data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan RSUD Bendan Kota Pekalongan selama periode laporan tahun 2011 sampai dengan 2015.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Rata-Rata Rasio Kas sebesar 270%, belum efisien dikarenakan belum mencapai skor target BLUD yang telah ditetapkan, Rata-rata Rasio Lancar sebesar 650% sudah memenuhi skor target BLUD yang telah ditetapkan sehingga BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan sudah berada dalam kondisi yang liquid, Rata-rata Rasio Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*) sebesar 83 hari, belum memenuhi standar BLUD yang telah ditetapkan, Rata – Rata Rasio Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turn Over*) sebesar 46,56%, sudah memenuhi standar BLUD yang telah ditetapkan, Rata – rata Rasio Imbalan atas Aktiva Tetap (*Return on Asset*) sebesar 4,26%, belum mencapai standar BLUD yang telah ditetapkan, Rata – rata rasio *Return on Equity* (ROE) sebesar 4.01%, masih dibawah standar BLUD yang telah ditetapkan, Rata-Rata Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional sebesar 78% sudah memenuhi standar BLUD yang telah ditetapkan, dari segi Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami peningkatan dikarenakan pihak manajemen BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan berangsur-angsur melakukan pemenuhan dokumen-dokumen sesuai ketentuan yang ditetapkan. **Kesimpulan** : Penilaian Kondisi Keuangan BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan berada pada **KATEGORI SEDANG, BBB** dengan Rata-rata Total Skor Penilaian dari tahun 2011 sampai 2015 sebesar 62,74%.

Kata Kunci : BLUD, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan

Abstract

This research aimed to evaluate the financial performance of Public Service Board Regional General Hospital Bendan Pekalongan City in 2011 to 2015 as measured by the ratio of Finance, Revenue Rate PNBPN and based of the Aspect Financial Management Compliance BLUDs Hospital. This research is quantitative descriptive research located in Bendan Pekalongan hospital. Data collection techniques used documentary method of secondary data obtained from the Financial Statements Bendan Pekalongan City Hospital during the period of 2011 to 2015.

Research shows that during the year 2011 to 2015 average Cash Ratio 270%, it is not yet reached the target score BLUDs predetermined average Current Ratio of 650% has met the target score BLUDs predetermined so BLUDs Hospital Bendan Pekalongan are already in liquid condition. Average ratio Collection Period by 83 days, do not meet the standards of BLUDs predetermined. Average Fixed Asset Turnover Ratio amounted to 46.56 %, already meet the standards BLUDs predetermined. Average Return on Assets (ROA) of 4.26%, has not reached a predetermined standard BLUDs. Average ratios Return on Equity (ROE) of 4,01% , still below the standard BLUDs predetermined Average Revenue Rate PNBPN against Operational Costs by 78% already meet the standards BLUDs been set, in terms of aspects Compliance Financial management BLUDs Hospital Bendan Pekalongan City from 2011 to 2015 has increased due to the management BLUDs Bendan

Hospital Kota Pekalongan gradually fulfilling the documents according to the provisions specified.
Conclusions: *Assessment of Financial Condition BLUDs Bendan Hospital Pekalongan are on MEDIUM CATEGORIES, BBB to Average Total Score Assessment from 2011 to 2015 amounted to 62.74%.*

Keywords: *BLUDs, Financial Performance, Financial Ratios*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mengamanatkan bahwa Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka kemudian Menteri Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa Rumah Sakit Daerah pada awal tahun 2012 diwajibkan sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Rumah Sakit dengan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan keleluasaan dalam menerapkan praktek bisnis sehat dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas. Rumah Sakit BLUD juga diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan pengadaan barang/jasa dengan tetap memegang kuat perencanaan, penganggaran maupun pertanggungjawabannya.

Setelah menjadi BLUD, Rumah Sakit diharuskan untuk melakukan penilaian kinerja baik kinerja pelayanan maupun kinerja keuangan, sehingga rumah sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan dapat bersaing dengan kompetitorinya. Kinerja keuangan suatu BLUD dapat menggambarkan tingkat kesehatan keuangan serta ketergantungan Rumah Sakit terhadap Dana subsidi yang diberikan oleh Pemerintah.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "Bendan" Kota Pekalongan sejak pertama kali dioperasionalkan pada tanggal 21 Mei 2009 RSUD Bendan Kota Pekalongan telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) langsung dengan status penuh sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/071 Tahun 2009.

Sesuai ketentuan pada pasal 127 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah haruslah dievaluasi dan dinilai kinerjanya setiap tahun oleh Bupati/Walikota atas aspek keuangan dan non keuangan maka berdasarkan ketentuan tersebut, secara berkala BLUD dinilai atau dievaluasi oleh tim penilai yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. Hasil penilaian akan dijadikan bahan pertimbangan peningkatan, penurunan, atau pencabutan status BLUD SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan.

Hasil studi pendahuluan dengan observasi pada RSUD Bendan didapatkan informasi bahwa sejak dikeluarkannya pedoman baru tentang penilaian kinerja keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Direktorat Bina Upaya Kesehatan yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Perbendaharaan Nomor PER/36/PB/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan, sampai dengan tahun 2015 RSUD Bendan belum pernah melakukan evaluasi kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan peraturan tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Menurut Mamesah dalam (Halim, 2002), "Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai

ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut (Halim, 2002) ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).(p.20)

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Jadi manajemen keuangan daerah adalah “pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut”. Manajemen keuangan daerah pengelolaannya terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, dan kepengurusan khusus berkaitan dengan barang-barang inventaris kekayaan daerah. Alat untuk melaksanakan Manajemen keuangan daerah disebut tata usaha daerah.

Rumah Sakit

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan publik memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan semakin tingginya tuntutan bagi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan terbatasnya anggaran yang tersedia bagi operasional rumah sakit, alur birokrasi yang terlalu panjang dalam proses pencairan dana, aturan pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran pelayanan dan sulitnya untuk mengukur kinerja, sementara rumah sakit memerlukan dukungan SDM, teknologi dan modal yang sangat besar.

Melalui konsep pola pengelolaan BLU, rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, mendorong enterpreneureship, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik,

sesuai dengan tiga pilar yang diharapkan dari pelaksanaan PPK-BLU ini, yaitu mempromosikan peningkatan kinerja pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik.

Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan petunjuk operasional untuk Badan Layanan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disusun dan disajikan sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian anggaran dan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dikompilasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga struktur pendapatan dan belanja mengikuti nomenklatur pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kinerja Keuangan

Menurut Musclih (2003) Kinerja keuangan adalah prestasi keuangan yang tergambar dalam laporan keuangan perusahaan yaitu neraca rugi-laba dan kinerja keuangan menggambarkan usaha perusahaan (*operation income*). Profitability suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan kekayaan asset yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan.”(p.44)

Gitosudarmo dan Basri (2002) berpendapat bahwa ”penilaian kinerja keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu dilaporkan dalam laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi dan neraca.”(p.275)

Untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dapat digunakan berbagai macam alat analisis, antara lain :

1. Analisis rasio keuangan digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi keuangan.
2. Analisis kesehatan keuangan perusahaan (analisis diskriminan) digunakan untuk mengingatkan akan masalah keuangan yang mungkin membutuhkan perhatian yang serius dan menyediakan petunjuk untuk bertindak

3. Analisis Du Pont merupakan pendekatan terpadu terhadap analisis rasio keuangan, sering digunakan untuk pengendalian divisi.
4. Analisis Horizontal dan Vertikal digunakan sebagai perbandingan laporan
5. Analisis sumber dana dan penggunaan dana menyediakan latar belakang Historis dari pola aliran dana.
6. Analisis kinerja dengan metode *Economic Value Added* (EVA). Eva merupakan indikator tentang adanya penambahan nilai dari suatu investasi.

Penilaian Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja (Satker) Badan Layanan Umum (BLU) Bidang Layanan Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-36/PB/2012. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa penilaian kinerja keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan Satuan Kerja Badan Layanan Umum kepada masyarakat khususnya untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan Satker BLU yang meliputi dua aspek yaitu: Aspek Keuangan dan Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU. Adapun Tata Cara Penilaian Kinerja Keuangan Satker BLU Bidang Layanan Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Bobot Aspek Keuangan dan Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU Bidang Layanan Kesehatan

No	Aspek	Bobot
A.	Aspek Keuangan	65
	1. Rasio Keuangan	(bobot 53)
	2. Rasio pendapatan PNB(Pendapatan Negara Bukan Pajak) terhadap biaya operasional	(bobot 12)
B.	Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	35
	TOTAL BOBOT	100

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba menggambarkan suatu peristiwa, kondisi, atau gejala, secara sistematis, faktual, dengan berdasarkan data-data angka yang akurat.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di RSUD Bendan Kota Pekalongan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak berdirinya Rumah Sakit pada Tahun 2009.

Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumenter terhadap data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan RSUD Bendan selama periode laporan tahun 2011 – 2015.

Definisi Operasional Variabel

1. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio Kas dipergunakan untuk mengukur kemampuan Rumah Sakit dalam memenuhi kewajiban yang segera harus dibayar melalui *cash assets* yang dimiliki.

Rumus :

$$\frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

2. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar (*Current Ratio*) merupakan Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki

Rumus :

$$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

3. Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*)

Rasio Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*) digunakan untuk melihat perbandingan antara piutang usaha dengan pendapatan usaha dalam satu tahun.

Rumus :

$$\frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 360 \text{ hari}$$

4. Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover*)

Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover*) digunakan untuk melihat perbandingan antara pendapatan operasional dengan aset tetap.

Rumus :

$$\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

5. Imbalan atas Aset Tetap (*Return on Fixed Asset*)

Imbalan atas Aset Tetap (*Return on Fixed Asset*) digunakan untuk melihat perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber APBD ditambah biaya penyusutan dengan nilai perolehan aset tetap tidak termasuk konstruksi dalam pengerjaan.

Rumus :

$$\frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

6. Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*)

Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*) digunakan untuk melihat perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber APBD ditambah biaya penyusutan

dengan ekuitas setelah dikurangi surplus/deficit tahun berjalan.

Rumus :

$$\frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian}}{\text{Ekuitas - Surplus atau defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian}} \times 100\%$$

7. Rasio Pendapatan BLUD terhadap Biaya Operasional

Rasio Pendapatan BLUD terhadap Biaya Operasional digunakan untuk melihat perbandingan antara penerimaan BLUD dengan biaya operasional. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak belanja operasional Rumah Sakit dapat dibiayai dari pendapatan fungsional Rumah Sakit.

Rumus :

$$\frac{\text{Pendapatan BLUD}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\%$$

8. Tingkat Kemandirian BLUD

Tingkat Kemandirian BLUD adalah rasio yang menunjukkan seberapa mampu Rumah Sakit membiayai seluruh belanja dari pendapatan fungsionalnya baik belanja operasional maupun belanja investasinya.

Rumus :

$$\frac{\text{Pendapatan Fungsional BLUD}}{\text{Belanja Operasional + Belanja Investasi}} \times 100\%$$

9. Rasio Subsidi Pemerintah Daerah terhadap Total Anggaran

Rasio Subsidi Pemerintah Daerah terhadap Total Anggaran adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar subsidi yang diterima oleh Satker BLUD.

Rumus :

$$\frac{\text{Subsidi APBD}}{\text{Total Anggaran BLUD}} \times 100\%$$

10. Rasio Surplus dibanding Realisasi Belanja Operasional BLUD

Rasio Surplus dibanding Realisasi Belanja Operasional BLUD digunakan untuk mengukur seberapa besar surplus yang ditahan dari Satker BLUD terhadap Belanja Operasional dari Satker BLUD.

Rumus :

$$\frac{\text{Surplus BLUD}}{\text{Belanja Operasional BLUD}} \times 100\%$$

11. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD

Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan BLUD terhadap Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengelolaan Keuangan BLUD meliputi :

- 1) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif
- 2) Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
- 3) Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU
- 4) Tarif Layanan
- 5) Sistem Akuntansi
- 6) Persetujuan Rekening
- 7) SOP Pengelolaan Kas
- 8) SOP Pengelolaan Piutang
- 9) SOP Pengelolaan Utang
- 10) SOP Pengadaan Barang dan Jasa
- 11) SOP Pengelolaan Barang Inventaris

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dari rasio keuangan dan penilaian kinerja keuangan sesuai

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER/36/PB/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan.

kinerja keuangan BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan dilakukan dengan menghitung rasio - rasio keuangan dan perkembangan rasio - rasio tersebut yang dilihat dari Neraca Keuangan dan Laporan Realisasi Anggaran BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Penggunaan analisis deskriptif penelitian ditunjukkan untuk mengetahui gambaran

Informasi yang disajikan mengenai karakteristik variabel penelitian tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Informasi Umum Kinerja Keuangan Rumah Sakit

Variabel	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
Cash Ratio	392%	81%	139%	361%	376%	270%
Current Ratio	1809%	150%	271%	465%	556%	650%
Collection Period	191	86	69	22	49	83
PAT	25,10%	38,48%	45,83%	53,46%	69,92%	46,56%
Return on Asset (ROA)	0,82%	8,53%	0,33%	10,96%	0,63%	4,26%
Return on Equity	0,78%	8,55%	0,29%	9,97%	0,47%	4,01%
Rasio Pendapatan BLUD terhadap Biaya Operasional	67,52%	91,23%	73,32%	80,01%	77,18%	77,86%
Tingkat Kemandirian BLUD	67,52%	106,42%	80,99%	86,38%	84,52%	85%
Rasio Subsidi Pemda terhadap Total Anggaran	28,18%	18,44%	21,89%	15,85%	12,63%	19,40%
Rasio Surplus thd Belanja Operasional	3,35%	28,49%	0,73%	25,79%	0,91%	11,86%

Sumber : Data Olahan Laporan Keuangan RSUD Bendan Kota Pekalongan

Dari tabel 1 tersebut dapat dijelaskan antara lain :

1. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio Kas (*Cash Ratio*) adalah kemampuan ketersediaan kas BLUD Rumah Sakit untuk menutup kewajiban jangka pendeknya. Angka Rasio Kas BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 81%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 terjadi peningkatan kewajiban jangka pendek atau hutang Rumah Sakit yang lebih besar

dibandingkan dengan kenaikan uang tunai yang tersedia di Rumah Sakit.

Rata-Rata Rasio Kas BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebesar 270%, jika dibandingkan dengan menggunakan standar BLUD dimana angka Cash Ratio terbaik suatu BLUD Layanan Kesehatan adalah antara 300% sampai dengan 360%, maka rata-rata kinerja BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 belum efisien dikarenakan belum mencapai skor target BLUD yang telah ditetapkan.

2. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar (*Current Ratio*) merupakan rasio yang mengukur kemampuan BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Angka Rasio Lancar BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 150%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 terjadi peningkatan kewajiban jangka pendek atau hutang Rumah Sakit yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan Aset Lancar Rumah Sakit.

Angka rata-rata *Current Ratio* selama 5 tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar 650%, jika dibandingkan dengan menggunakan standar BLUD dimana angka *Current Ratio* terbaik suatu BLUD Layanan Kesehatan adalah minimal 600%, maka BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan berada dalam kondisi yang liquid.

3. Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*)

Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*) merupakan rasio yang mengukur seberapa lama penagihan piutang Rumah Sakit dalam suatu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang berputar dalam suatu periode. Semakin kecil angka Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*) maka semakin baik kinerja BLUD. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 angka Periode Penagihan Piutang BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan semakin menurun dari 191 hari pada tahun 2011 menjadi 22 hari pada tahun 2014, namun pada tahun 2015 angkanya meningkat menjadi 49 hari sedangkan angka rata-rata Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*) BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar 83 hari, jika dibandingkan dengan standar BLUD dimana angka Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*) minimal 20 hari maka belum memenuhi standar yang ditetapkan.

4. Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover*)

Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover*) merupakan rasio yang digunakan

untuk mengidentifikasi bagaimana aset tetap digunakan untuk menghasilkan pendapatan suatu BLUD. Semakin besar nilai Rasio Perputaran Aset Tetap menandakan semakin optimalnya BLUD dalam menggunakan aset tetapnya.

Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 angka Rasio Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover*) BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari sebesar 25,10% pada tahun 2011 menjadi 69,92% pada tahun 2015 dengan angka rata-rata rasio sebesar 46,56%, jika dibandingkan dengan menggunakan standar BLUD dimana angka *Fixed Asset Turnover* terbaik suatu BLUD Layanan Kesehatan adalah minimal 25%, maka BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan sudah mampu mengoptimalkan aset tetap yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan operasional yang optimal.

5. Imbalan atas Aktiva Tetap (*Return on Asset*)

Imbalan atas Aktiva Tetap (*Return on Asset*) merupakan rasio digunakan untuk mengukur efektifitas suatu BLUD dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba suatu BLUD. Semakin tinggi angka Rasio Imbalan atas Aktiva Tetap (*Return on Asset*) suatu BLUD maka semakin optimal kinerja BLUD tersebut dalam menghasilkan keuntungan. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 angka Rasio Imbalan atas Aktiva Tetap (*Return on Asset*) BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan menunjukkan angka yang fluktuatif dengan rata-rata sebesar 4,26%, jika dibandingkan dengan menggunakan standar BLUD dimana angka *Return on Asset* (ROA) terbaik suatu BLUD Layanan Kesehatan adalah minimal 9%, maka dari tahun 2011 sampai dengan 2015 yang sudah memenuhi standar hanya terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 10,96%. Sedangkan Rasio *Return on Asset* (ROA) pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2015 belum memenuhi standar. Hal ini menunjukkan bahwa BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan masih belum mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keuntungan sejak berdiri sampai dengan tahun 2015.

6. Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*)

Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*) merupakan rasio digunakan untuk mengukur efisiensi suatu BLUD dalam penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi angka Rasio ini maka akan semakin baik artinya posisi modal BLUD tersebut semakin kuat. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 angka Rasio Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*) BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan juga menunjukkan angka yang fluktuatif dengan rata-rata sebesar 4,01%, jika dibandingkan dengan standar BLUD bahwa Rasio *Return on Equity* (ROE) terbaik suatu BLUD Layanan Kesehatan adalah minimal 9 % BLUD RSUD Bendan yang sudah memenuhi standar hanya terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 9,97%. Sedangkan Rasio *Return on Equity* (ROE) pada tahun 2011 sebesar 0,78%, tahun 2012 sebesar 8,55%, tahun 2013 sebesar 0,29% dan tahun 2015 sebesar 0,47% jika dibandingkan dengan standar maka angka-angka tersebut belum memenuhi standar. Hal ini berarti bahwa posisi modal BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan sejak berdiri sampai dengan tahun 2015 masih sangat lemah sehingga BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2015 belum mampu menghasilkan keuntungan yang optimal.

7. Rasio Pendapatan BLUD terhadap Biaya Operasional (*Cost Recovery Rate*)

Rasio Pendapatan BLUD terhadap Biaya Operasional (*Cost Recovery Rate*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pendapatan BLUD yang digunakan untuk menutup belanja operasionalnya. Semakin besar angka *Cost Recovery Rate* maka akan semakin baik kinerja BLUD tersebut. BLUD Rumah Sakit dikatakan memiliki kinerja keuangan yang paling bagus jika angka *Cost Recovery Rate*-nya di atas 100%. Dan itu berarti seluruh pengeluaran rumah sakit dibiayai dari satu sumber saja yaitu pendapatan fungsionalnya.

Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 angka Rasio Pendapatan BLUD terhadap Biaya Operasional (*Cost Recovery Rate*) BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan juga menunjukkan angka yang fluktuatif dengan rata-rata sebesar 78% yang artinya kemampuan

pendapatan PNBPN untuk menutup Biaya Operasional BLUD Rumah Sakit adalah sebesar 78%.

Jika dibandingkan dengan standar BLUD yang menyebutkan bahwa Rasio Pendapatan BLUD terhadap Biaya Operasional terbaik suatu BLUD Layanan Kesehatan adalah minimal 75 %, maka Rasio Pendapatan BLUD terhadap Biaya Operasional BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang sudah memenuhi standar berada pada tahun 2012 sebesar 91,23%, tahun 2014 sebesar 80,01% dan tahun 2015 sebesar 77,18%. Demikian juga dengan angka rata-rata rasio sebesar 78% sudah memenuhi standar yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa Pendapatan BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan cukup mampu untuk memenuhi Biaya Operasionalnya.

8. Tingkat Kemandirian BLUD

Tingkat Kemandirian BLUD merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemandirian BLUD dalam membiayai seluruh belanjanya baik belanja operasional maupun belanja investasinya dari pendapatan fungsionalnya sendiri. Semakin besar angka Tingkat Kemandirian BLUD maka akan semakin baik kinerja BLUD tersebut. BLUD Rumah Sakit dikatakan memiliki kinerja keuangan yang paling bagus jika angka Tingkat Kemandiriannya di atas 100%.

Pada tahun 2011 sampai dengan 2015 angka Tingkat Kemandirian BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan mengalami fluktuasi. Angka Tingkat Kemandirian tertinggi hingga terendah berturut-turut yaitu tahun 2012 sebesar 106,42%, tahun 2014 sebesar 86,38%, tahun 2015 sebesar 84,52%, tahun 2013 sebesar 80,99% dan posisi terendah didapatkan pada tahun 2011 dengan nilai sebesar 67,52%. Rata-rata Rasio *Cost Recovery Rate* BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan sebesar 85%, jika dibandingkan dengan standar yang diharapkan maka BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan belum memenuhi standar yang diharapkan. Hal ini berarti BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan belum mampu membiayai belanja operasional maupun

belanja investasinya dari pendapatan fungsionalnya.

9. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD

Kepatuhan Pengelolaan Keuangan merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan BLUD terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pada Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 skor penilaian terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD didapatkan angka tertinggi pada tahun 2015 dengan skor sebesar 21,12% dan angka terendah diperoleh pada tahun 2011 dan 2012 yaitu sebesar 17,87%. Jika dibandingkan dengan standar BLUD bahwa Skor terhadap Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD terbaik minimal 35%, maka BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2015 belum memenuhi standar.

10. Penilaian Kinerja Keuangan

Penilaian kinerja keuangan terdiri dari aspek keuangan dan aspek kepatuhan pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER.36/PB/2012 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2013, kinerja keuangan BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan termasuk dalam kategori Sedang (BB) dimana apabila 50 Total Skor 60. Total skor pada tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah sebesar 58,67%, 55,47% dan 55,12%. Sedangkan skor tahun 2014 sebesar 75,92% menunjukkan kategori Tinggi (A) dan skor pada tahun 2012 sebesar 68,52% termasuk dalam kategori Sedang (BBB). Adapun rata-rata Skor Penilaian Kinerja Keuangan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar 62,74% termasuk dalam kategori Sedang (BBB).

SIMPULAN

Berikut ini adalah simpulan berdasarkan penilaian kinerja keuangan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER.36/PB/2012 :

1. Rata-rata skor penilaian kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar 31,8%,

jika dibandingkan dengan standar BLUD Layanan Kesehatan minimal sebesar 53% maka BLUD RSUD Bendan belum memenuhi standar yang diharapkan.

2. Rata-rata skor penilaian kinerja keuangan berdasarkan rasio pendapatan PNPB dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar 11,52%, jika dibandingkan dengan standar BLUD Layanan Kesehatan minimal sebesar 12% maka BLUD RSUD Bendan belum memenuhi standar yang diharapkan.
3. Rata-rata skor penilaian kinerja keuangan berdasarkan Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar 19,42%, jika dibandingkan dengan standar BLUD Layanan Kesehatan minimal sebesar 35% maka BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan juga belum memenuhi standar yang diharapkan.
4. Hasil Penghitungan Akhir dari Penilaian Kinerja Keuangan BLUD RSUD Bendan Kota Pekalongan diketahui bahwa rata-rata Total Skor BLUD RSUD Bendan sebesar 62,74% termasuk dalam kategori **Kategori SEDANG, BBB** (apabila 60 Total Skor 70).

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki (2007), *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Penerbit Kreasi Kencana, Yogyakarta
- Gitosudarmo, Indriyo, & Basri (2002), *Manajemen Keuangan*, edisi keempat, cetakan pertama, penerbit : BPFE, Yogyakarta
- Hanafi, Mamduh & Halim, Abdul (2007), *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi ketiga, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Halim, A. (2005). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Edisi Pertama, Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan S (2007), *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Harmono (2009), *Manajemen Keuangan, Berbasis Balanced Scorecard, Pendekatan Tori, Kasus dan Riset Bisnis*, cetakan pertama, penerbit : Bumi Aksara, Jakarta
- Heryanto (2013, 2 Juli). *Indikator-Indikator Pelayanan Rumah Sakit*. Diambil dari <http://heryant.web.ugm.ac.id>
- Kementerian Kesehatan RI No.1981/ Menkes/SK/XII/2010 tentang *Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit*, Jakarta
- Kementerian Kesehatan RI No.228/ Menkes/SK/III/2002 tentang *Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit*, Jakarta
- Laksono Trisnanto (2009), *Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan di Indonesia 2000-2007*, Yogyakarta
- Lestari, W. P. (2009). Analisa Faktor Penentu Kepuasan Pasien di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Indonesia, Universitas Islam Indonesia* .
- Madjid, Noor Choliz, Cahyono, Heru & Tohirin (2009). *Evaluasi Antara Kinerja Keuangan dan Operasional Pada satker Rumah Sakit Umum Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum*. Jakarta: Kajian Akademis, BPPK.
- Masnah. (2012). Analisis Rasio Financial dan Rasio Non Financial Sebagai Dasar Pengukuran Kinerja RSUP dr. Muhammad Hoesin Palembang. *Jurnal Manajemen Pelanggan Kesehatan, Universitas Binadarma* .
- Munawir, S (2007), *Analisa Laporan Keuangan*, edisi keempat, Liberti, Yogyakarta
- Muslich Mohamad (2003), *Manajemen Keuangan Modern, Analisis, Perencanaan, dan Kebijaksanaan*, cetakan ketiga, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta
- Nurlan Darise (2009), *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*, edisi kedua, cetakan pertama
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61(2007), *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*, Jakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan No.07 (2006), *Persyaratan Administrasi dalam rangka pengusulan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum*, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, *Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*, Jakarta
- Permenkeu No.76/PMK.05/2008 tentang *Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum*, Jakarta
- Prastowo, Dwi & Juliyati, Rifka (2005), *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi*, Edisi kedua, UPP UMP YKPN, Yogyakarta
- RSUD Bendan Kota Pekalongan. (2015). *Profil RSUD Bendan Kota Pekalongan*. Kota Pekalongan.
- Sunanto, S., & Nandiwardhana, A. (2005). Analisis Kesenjangan Dimensi Kualitas Layanan Berdasarkan Persepsi Manajemen dan Persepsi Pasien Pada Unit Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Aziz Singkawang Kalimantan Barat. *Jurnal Widya Manajemen dan Akuntansi, Vol 5, No.1* .
- Supangat, J. (2011, Oktober 17). *Komposisi Belanja Fungsional-Subsidi yang*

Optimal. Retrieved Juli 29, 2016, from www.ppkblud.com.

Sundarwati. (2011). *Analisis Kinerja Keuangan PPK-BLUD RSUD dr. GHR Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Triwijayanti, H. & Sriyanto (2015). Evaluasi Kinerja Pelayanan Dan Keuangan RSUD Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Keuangan BLUD di Subosukowonosraten. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Perbankan*, 1 (1), 28-38.

Zarkasyi, Moh, & Wahyudin (2008), *Good Corporate Governance, Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, cetakan kesatu, Penerbit : Alfabeta, Bandung